



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD TAUFIQ RATULE**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **143273**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.894.431.291

1. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 83.065.826
2. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 90.657.468
3. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/36 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 257.968.408
4. Tanah Seluas 2.093 m2 di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 84.318.816
5. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 781.275.210
6. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 12.762.815
7. Tanah Seluas 100.000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 36.754.593
8. Tanah Seluas 100.000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 42.542.718
9. Tanah Seluas 200.000 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 85.085.437
10. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/50 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 82.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI

Rp. 75.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR B65 - R Tahun 2019, HASIL

SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 153.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.864.679.997

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.994.611.288

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.994.611.288

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HOTMAN FAJAR SIMANJUNTAK**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **1016116**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.848.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 14.519 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, Rp. 225.000.000
4. Tanah Seluas 13.175 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, Rp. 145.000.000
5. Tanah Seluas 13.959 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 969 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 14.394 m2/80 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000
8. Tanah Seluas 15.462 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
9. Tanah Seluas 14.335 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
10. Tanah Seluas 14.890 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 826 m2/100 m2 di KAB / KOTA



BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

282.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS KIJANG INOVA REBORN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA CBX 150 CC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

284.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

43.516.557

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

3.457.516.557

III. HUTANG

Rp.

830.787.432

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.626.729.125

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IR. TOMMY NUGRAHA, MM
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 794482

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	352.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN BEBEK Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.480.744.679
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.582.744.679
III. HUTANG	Rp.	43.825.231
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.538.919.448

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. IR. SUDI MARDIANTO M.SI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 497125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/114 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. Tanah Seluas 650 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN LCGC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.630.050.625

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.790.050.625

III. HUTANG Rp. 51.143.304

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.738.907.321

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DR. MUHAMMAD AGUNG SUNUSI, S.P., M.SI.**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **1000467**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/29 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 610.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.746.000.000

III. HUTANG Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.576.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LELI NURYATI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 404005

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 993.860.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI , Rp. 993.860.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 581.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 ULTIMATE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO PGM F1 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX 160 CBS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
5. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.530.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 921.316.223

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.546.706.223

III. HUTANG Rp. 169.560.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.377.146.223



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KAROL LESMANA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 230542

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	98.000.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	125.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	207.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.530.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.530.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.